

Doi:

Website: <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com>

Naskah Masuk	Direvisi	Diterbitkan
5 Juni 2024	23 Juni 2024	28 Juni 2024

Manajemen Pembiayaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatun Najah)

As'adut Tabi'in

Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatun Najah Rengat

Email: a2d.al.andalasi@gmail.com

ABSTRACT

Private higher education institutions are generally run by community groups where the financing of education is borne independently. Basically, education financing in Indonesia is also the responsibility of both central and regional governments. STAI Madinatun Najah Rengat is a private religious higher education institution under the auspices of Kopertais 12 Riau and Riau Islands, which is consistent in creating quality education. The aim of this research is to describe how funding management is carried out by STAI Madinatun Najah as an effort to improve the quality of education. This research was conducted using a qualitative approach, where data was obtained using interview, observation and documentation methods. Data analysis was carried out by data reduction, data display, verification and drawing conclusions. The results of this research show that STAI Madinatun Najah carries out financing management as an effort to improve the quality of education in general, consisting of two types, namely: 1) Providing various educational financing relief for students 2) Providing rewards to lecturers in implementing the Tri Dharma of Higher Education.

Keyword: Education Management, Financing Management, Education Quality

Abstrak

Lembaga pendidikan tinggi swasta pada umumnya diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dimana pembiayaan terkait penyelenggaraan pendidikan ditanggung secara swadaya. walaupun demikian pada dasarnya pembiayaan pendidikan juga merupakan tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah. STAI Madinatun Najah Rengat merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi keagamaan swasta dibawah naungan Kopertais 12 Riau dan Kepulauan Riau, yang konsisten dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk medeskripsikan bagaimana manajemen pembiayaan yang dilakukan STAI Madinatun Najah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa STAI Madinatun Najah melakukan manajemen pembiayaan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) Pemberian berbagai keringan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa 2) Pemberian reward pada dosen dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Manajemen Pendidikan, Manajemen Pembiayaan, Mutu Pendidikan

Pendahuluan

Pembiayaan dalam penyelenggaraan program pendidikan tinggi dapat dikatakan sebagai komponen penggerak terselenggaranya proses pembelajaran, dimana pembiayaan tersebut meliputi gaji

dosen, staf, pengembangan, perawatan dan pembangunan gedung, penyelenggaraan aktivitas akademik dan non-akademik, penyelenggaraan kegiatan mahasiswa yang menunjang proses pembelajaran, biaya kebersihan, keamanan, listrik, air, dan sebagainya, yang tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Menurut Mulyasa “keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan”.¹ Dengan demikian perguruan tinggi membutuhkan manajemen atau pengelolaan pembiayaan yang handal agar semua aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian berjalan secara berkelanjutan, optimal dan bermutu.

Biaya pendidikan merupakan komponen *instrumental input* yang sangat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan program pendidikan. Biaya dalam proses pendidikan sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas.² Bisa dikatakan bahwa tujuan pendidikan tidak dapat tercapai secara optimal tanpa peran biaya. Biaya (*cost*) dalam hal ini adalah segala bentuk pengeluaran baik berupa uang, barang dan jasa yang memiliki harga, untuk terselenggaranya proses pendidikan oleh perguruan tinggi. Pengelolaan pembiayaan pendidikan (*educational finance*) dalam hal ini adalah upaya lembaga pendidikan mengatur perencanaan pembiayaan, bagaimana memperolehnya, pengalokasiannya, dan pelaporannya.

Lembaga pendidikan tinggi swasta pada umumnya diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang pembiayaannya sebagian besar bersumber dari masyarakat sendiri. Adapun bantuan dari pemerintah baik daerah maupun pusat biasanya berupa hibah, beasiswa (baznas, Pemprov), bantuan biaya pendidikan bagi warga tidak mampu seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), hibah penelitian dan pengabdian bagi dosen dimana untuk memperolehnya harus berkompetisi dengan seluruh dosen perguruan tinggi se-Indonesia. Bisa dikatakan pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta dibiayai oleh mereka sendiri. Di sisi lain perguruan tinggi swasta dituntut untuk terus update dan meningkatkan mutu pendidikannya, baik penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, pengabdian dan kontrol kualitas pendidikan dalam bentuk akreditasi program studi dan perguruan tinggi dimana hal ini harus dilakukan 5 tahun sekali. Hal ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu. Untuk biaya akreditasi Program Studi Kependidikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM-Dik) paling tidak Perguruan Tinggi Swasta harus menghabiskan 52 juta per-prodi, atau 104 Juta bagi STAI Madinatun Najah untuk 2 Prodi Kependidikannya. Hal tersebut cukup membuat Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri di Daerah Terpencil seperti STAI Madinatun Najah harus berfikir keras untuk berjuang mempertahankan eksistensi dan kualitas pendidikannya.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan STAI Madinatun Najah sudah sangat maksimal, baik pelayanan, fasilitas, penelitian, pengabdian, publikasi ilmiah dosen, dengan jumlah

¹ E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 47

² Dedi Supriyadi. *Satuan Biaya Pendidikan: Dasar dan Menengah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010) hlm. 3-4

mahasiswa sebanyak 202 orang, 12 orang Dosen, dan 5 orang Tenaga Kependidikan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana penerapan manajemen pembiayaan yang dilakukan STAI Madinatun Najah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis data kualitatif model Miles dan Huberman³ yang terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil dan Pembahasan

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Manajemen pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang mengupayakan bagi mana mendapatkan biaya atau sumber dana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian bagaimana dana yang telah diperoleh dipergunakan berdasarkan pada rencana pembiayaan, memperbesar modal kerja, serta merencanakan kebutuhan dana dimasa yang akan datang.⁴ Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki dua definisi. Secara sempit pengelolaan/ manajemen pembiayaan adalah tata pembukuan. Sedangkan definisi pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam arti luas adalah sebuah kegiatan pengurusan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah.⁵ Sedangkan Martin mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah sebuah proses pengalokasian sumber dana pada kegiatan atau program pendidikan. Sedangkan pengelolaan pembiayaan pendidikan tersebut meliputi perencanaan anggaran, proses pembiayaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan.⁶

Artinya Manajemen pembiayaan pendidikan adalah sebuah upaya untuk merencanakan anggaran pembiayaan pendidikan, perolehan sumber dana, pengalokasian, pelaksanaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta pengawasan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, efisiensi dan akuntabel.

1. Tujuan Manajemen Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Tujuan manajemen keuangan menurut Rohiat adalah “untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.⁷ Dengan demikian tujuan pengelolaan pembiayaan pada lembaga pendidikan yaitu: 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dalam pemakaian dana pendidikan; 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pendidikan dalam mengelola keuangan; 3)

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Alfabeta. 2017) hlm. 334

⁴ Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2010) hlm. 87

⁵ Sulistyorini. *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009) hlm. 130

⁶ Martin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 4

⁷ Rohiat. *Manajemen Sekolah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hlm. 27

Meminimalisir penyelewengan dana dan anggaran. Sedangkan menurut Mohamad Mustari dan Husaini Usman⁸ Tujuan dan manfaat pengelolaan pembiayaan dalam lembaga pendidikan adalah: “1) Terciptanya suasana belajar ideal dan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna (Pakemb). 2) Terbentuknya peserta didik aktif, dan senantiasa mengembangkan potensi diri. 3) Meningkatnya kompetensi manajerial tenaga pendidik dan kependidikan. 4) Tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. 5) Tenaga kependidikan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait proses serta tugas administrasi lembaga pendidikan. 6) Meningkatkan mutu pendidikan. 7) Terwujudnya perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. 8) Meningkatkan citra positif pendidikan”.⁹

Dari penjelasan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk tercapainya tujuan pendidikan, dan terciptanya proses pendidikan yang ideal, bermutu, meningkatkan motivasi pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Fungsi pengelolaan pembiayaan menurut Asep Suryana¹⁰ adalah mendapatkan dan menggunakan dana. Bafadal mengungkapkan 6 fungsi pengelolaan pembiayaan, yaitu: “1) merencanakan anggaran tahunan, 2) pengadaan anggaran, 3) pendistribusian anggaran, 4) pelaksanaan anggaran, 5) pembukuan keuangan, 6) pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan”.¹¹

Sedangkan menurut Oemar Hamalik, “fungsi pengelolaan pembiayaan dalam pendidikan yaitu: 1) fungsi perencanaan, 2) fungsi organisasi, 3) fungsi koordinasi, 4) fungsi motivasi (penggerakan), dan 5) fungsi control”.¹²

3. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Hal terpenting bagi penyelenggara pendidikan terkait dana atau biaya pendidikan adalah dari mana sumber dana dapat diperoleh. Menurut UU. No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 tentang Sisdiknas di sebutkan bahwa “tanggung jawab pendanaan/pembiayaan pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”.¹³ Hal ini mengindikasikan bahwa yang bertanggungjawab atas pembiayaan pendidikan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama. Sumber pembiayaan pendidikan sebagaimana telah diatur dalam pasal 47, UU. No.20 tahun 2003 bahwa pembiayaan pendidikan ditentukan berdasarkan pada tiga prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip kecukupan, dan prinsip keberlanjutan. Sedangkan pengelolaan pembiayaan pendidikan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 48, harus berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

⁸ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 8

⁹ Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 6-7

¹⁰ Asep Suryana, Suryadi. *Pengelolaan Pendidikan* (Jakarta: Departemen Agama RI. 2009) hlm. 2

¹¹ Hermiono Agustinus, *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 71

¹² Oemar Hamalik. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) hlm. 81-82

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46.

Pembiayaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah, dan pemerintah daerah, dan juga dapat bersumber dari bantuan pihak asing yang bersifat tidak mengikat dan sumber lain yang dianggap sah berdasarkan undang-undang. Sedangkan dana pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diperoleh dari pendiri atau yayasan penyelenggara, masyarakat, peserta didik atau orang tua peserta didik, bantuan berupa hibah yang bersumber dari pemerintah, bantuan pemerintah daerah, dana hibah berasal dari pihak asing yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara dan sumber pendanaan lain yang sah.

Sumber dana pendidikan menurut Dadang Suhardan antara lain dapat bersumber dari “1) pemerintah seperti APBN dan APBD, 2) SPP, 3) Masyarakat, 4) dunia bisnis (perusahaan) dan 5) hibah”.¹⁴ Sedangkan menurut Yeti Heryati & Mumuh Muhsin dapat bersumber dari 1) Dana yang dianggarkan pemerintah, 2) Iuran yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, 3) Sumbangan sukarela bagi donatur.¹⁵ Lebih lanjut Nanang Fatah mengungkapkan bahwa dalam menilai sistem pendanaan pendidikan terdapat tiga kriteria yaitu: “1) adekuasi (kecukupan) ketersediaan sumber daya untuk layanan pendidikan, 2) efisiensi dalam distribusi sumber pendidikan dan 3) pemerataan dalam distribusi sumber-sumber pendidikan”.¹⁶

Untuk pengelolaan pembiayaan pendidikan di waktu yang akan datang, lembaga pendidikan perlu mengetahui siapa penanggung jawab pendanaan pendidikan, dari mana pendanaan pendidikan yang telah lalu berasal, mengetahui sumber dana yang relatif potensial dan belum dimanfaatkan, dan menganalisa serta mengkaji sumber pembiayaan lain. Menurut Matin, setidaknya ada lima jenis sumber dana yang dapat berkontribusi terhadap pembiayaan pendidikan yaitu; 1) sumber pemerintah, 2) sumber swasta, 3) klien dari sistem pendidikan seperti SPP, 4) penghasilan masyarakat dan sekolah, dan 5) subsidi melalui institusi misalnya latihan keterampilan yang dibiayai oleh perusahaan.¹⁷

Dari beberapa pendapat dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber dana atau pembiayaan pendidikan secara umum ada tiga, yaitu: 1) dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah 2) dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah daerah, dan 3) dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat.

4. Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Terkait prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan, Mardiasmo mengungkapkan beberapa prinsip yang mendasarinya yaitu; transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*.¹⁸ Hal serupa juga dilakukan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah yang juga berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.

¹⁴ Dadang Suhardan dkk.. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 21

¹⁵ Yeti Heryati & Muhsin Mumuh. *Manajemen Sumber Daya Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) hlm. 227

¹⁶ Nanang Fatah. *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 3

¹⁷ Matin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 155-157

¹⁸ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002). hlm.105

Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagaimana yang telah diatur dalam UU. No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa “pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing prinsip di atas:¹⁹

a. Transparansi.

Transparan artinya terbuka, yaitu adanya keterbukaan antara madrasah dengan pihak yang berkepentingan terkait pengelolaan pembiayaan pendidikan, seperti sumber dana dan besaran perolehannya, rincian penggunaan dana, dan kejelasan pertanggungjawabannya. Transparansi pengelolaan pembiayaan bagi lembaga pendidikan tentunya akan berdampak positif, seperti meningkatnya dukungan masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan dan dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Selain itu, transparansi pengelolaan pembiayaan pendidikan akan menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi.

b. Akuntabilitas.

Akuntabilitas pada kajian ilmu manajemen keuangan memiliki definisi sebagai penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan. Pertanggungjawaban ini dapat berupa pelaporan atau publikasi nyata dari suatu aktivitas yang menggunakan biaya itu agar dapat di konsumsi secara publik baik oleh pengguna layanan pendidikan, masyarakat maupun pemerintah. Syarat terwujudnya akuntabilitas dalam sebuah lembaga pendidikan setidaknya harus memiliki tiga pondasi utama yaitu: 1) transparansi para anggota organisasi lembaga pendidikan, dengan cara melibatkan seluruh komponen dalam pengelolaan perguruan tinggi, 2) memiliki standar kinerja yang terukur, 3) saling berpartisipasi untuk menciptakan suasana kondusif, dengan memberikan pelayanan dengan prosedur yang mudah, murah dan cepat.

c. Efektivitas.

Sebuah pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang efektif dapat tercapai jika pengelolaan keuangan lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Yaitu pengelolaan keuangan yang secara efektif dapat membiayai seluruh kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikannya sesuai dengan perencanaannya.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Garner mengatakan *Efficiency* “characterized by quantitative outputs”. Efisiensi adalah daya yang meliputi biaya, waktu, pikiran dan tenaga yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan berbanding lurus dengan hasil yang direncanakan. Artinya *input* yang diterima dan dikelola sesuai dengan *output* nya.

5. Jenis Pembiayaan dalam Lembaga Pendidikan

¹⁹ Karna Husni, *Manajemen Perubahan Sekolah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) hlm. 278-279

Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan pendidikan
- b. Biaya operasional meliputi biaya personalia dan biaya non personalia

Yang termasuk biaya personalia yaitu: “(1) gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan, (2) tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan, (3) tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan, (4) tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen, (5) tunjangan fungsional atau subsidi, (6) tunjangan fungsional bagi guru dan dosen, (7) tunjangan profesi bagi guru dan dosen, (8) tunjangan khusus bagi guru dan dosen, (9) maslahat tambahan bagi guru dan dosen, dan (10) tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar”.²⁰ Yang termasuk biaya non personalia yaitu: “(1) gaji pokok, (2) tunjangan yang melekat pada gaji, (3) tunjangan struktural bagi pejabat structural, (4) tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional”.²¹

6. Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Salah satu jenis pembiayaan pendidikan diantaranya adalah bantuan biaya pendidikan baik yang berasal dari organisasi masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan perusahaan. Terkait bantuan biaya pendidikan dan beasiswa ini mengacu dari beberapa ketentuan yaitu: (1) pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang tergolong tidak mampu berupa beasiswa sesuai dengan kewenangan pemerintah. (2) pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berprestasi berupa beasiswa sesuai dengan kewenangannya.

Dari paparan teori terkait pengelolaan pembiayaan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan adalah rangkaian aktivitas mengatur/mengelola keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan.

B. Manajemen Pembiayaan STAI Madinatun Najah dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga hal, 1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan pendekatan *educational production function* dengan kata lain menggunakan input analisis yang tidak konsisten, 2) sentralistik penyelenggaraan pendidikan, 3) minimnya peran serta orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.²² Joseph . M. Juran mengatakan bahwa 80% masalah yang berhubungan langsung dengan mutu terletak pada manajemen. Maka dari itu hendaknya manajemen yang baik harus sudah dilakukan secara efektif dan efisien sedini

²⁰ Republik Indonesia, PP. No. 48 Tahun 2008. Bagian Ketiga Biaya Operasi Satuan Pendidikan, Paragraf 1, Biaya personalia pasal 16

²¹ *Ibid.*,... Paragraf 2, Biaya Nonpersonalia pasal 21

²² Nuwahid Shulhan, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013) hlm. 106

mungkin.²³ Manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan memiliki definisi sebagai suatu metode untuk meningkatkan mutu pendidikan yang bertumpu pada lembaga pendidikan itu sendiri, menerapkan beberapa teknik berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif, mempeberdayakan seluruh komponen secara berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

Mahasiswa

Rekrutment mahasiswa yang dilakukan STAI Madinatun Najah Rengat dilakukan dengan empat jalur yaitu: 1) Jalur tahfidz Qur'an, 2) Jalur prestasi akademik, 3) jalur prestasi non-akademik; dan 4) Jalur tes tulis. Beberapa kebijakan yang diambil untuk meningkatkan motivasi calon mahasiswa oleh Ketua STAI Madinatun Najah adalah dengan bebas uang pembangunan senilai Rp. 2.000.000,- dan bebas biaya pendaftaran, bagi jalur tahfidz, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik. Dan ada beberapa langkah strategis yang diambil oleh STAI Madinatun Najah untuk meningkatkan minat calon mahasiswa dengan memberikan banya diskon bagi 10 orang pendaftar pertama dan berlaku di semua jalur pendaftaran.

Terkait administrasi keuangan STAI Madinatun Najah memberikan banyak keringanan pada mahasiswa dalam pelunasan SPP bagi mahasiswa, mengingat kampus ini terletak di daerah, kota kabupaten Indragiri Hulu. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang bekerjasama dengan STAI, memperbolehkan mahasiswa mengangsur pembayaran hingga 3 kali angsuran dengan beberapa ketentuan. Artinya mahasiswa dapat melakukan pembayaran 1 kali dalam waktu 2 bulan, selama 1 semester. Ini merupakan langkah jitu bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dalam memberikan pelayanan pendidikan yang meringankan beban mahasiswa, disaat perguruan tinggi lain menaikkan UKT-nya. Selain itu STAI Madinatun Najah juga terus berperan aktif dalam hal sosialisasi dan pengurusan administrasi program-program bantuan yang disediakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial. Terbukti pada tahun 2024 sebanyak 8 orang mahasiswa STAI Madinatun Najah memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Dinas Sosial Provinsi Riau, 14 orang mahasiswa memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Dinas Sosial Kabupaten, dan 22 orang untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Disamping itu STAI Madinatun Najah Rengat mendukung penuh program-program kemahasiswaan, dan menyediakan anggaran demi terciptanya aktivitas akademik di lingkungan STAI Madinatun Najah.

Peningkatan kualitas penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah dosen juga diterapkan secara optimal oleh STAI Madinatun Najah Rengat, melalu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), dengan memberikan *reward* sesuai dengan jenjang dan jenisnya. Jenjang dan jenis tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.1: Bantuan Publikasi Ilmiah Dosen STAI Madinatun Najah Rengat 2024

No	Jenis Publikasi	Nominal
1	Jurnal Scopus	Rp 750,000

²³ M. Jusuf Hanafiah dkk, *Pengelolaan Mutu Total Pendidikan Tinggi* (Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri, 1994) hlm. 101.

2	Jurnal Bereputasi/Terindex Scopus, WOS	Rp 750,000
3	Jurnal Sinta 1	Rp 750,000
4	Jurnal Sinta 2	Rp 750,000
5	Jurnal Internasional Tidak Bereputasi	Rp 600,000
6	Jurnal Prosiding Internasional Tidak Bereputasi	Rp 500,000
7	Jurnal Sinta 3	Rp 600,000
8	Jurnal Sinta 4	Rp 450,000
9	Jurnal Sinta 5	Rp 400,000
10	Jurnal Sinta 6	Rp 350,000
11	Jurnal Prosiding Nasional	Rp 350,000
12	Jurnal OJS/Belum Sinta (E-ISSN)	Rp 300,000
13	Buku ISBN (Monograf, Referensi, Bahan Ajar/Modul)	Rp 700,000
14	Buku Book Chapter/Bunga Rampai	Rp 450,000
15	Haki + Buku Semua Buku ISBN)	Rp 750,000

Sumber: Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) STAI Madinatun Najah Rengat

Kesejahteraan Dosen juga menjadi perhatian utama STAI Madinatun Najah Rengat, dengan terus berperan aktif memacu kelengkapan administrasi yang kemudian dibutuhkan untuk pengurusan jabatan fungsional dosen, dan pengajuan sertifikasi dosen. Hal ini terbukti 5 dari 12 orang dosen telah menerima sertifikasi dosen di tahun 2024. Selain itu STAI Madinatun najah Rengat juga memberikan dukungan dan apresiasi berupa bantuan penyelesaian studi bagi dosen yang sedang izin belajar. Terbukti 4 dari 12 orang Dosen STAI Madinatun Najah telah memperoleh gelar Doktor di tahun 2024.

Pelaporan yang dilakukan Wakil Ketua II kepada Yayasan Pendidikan Agama Islam Rengat 1 kali dalam setiap tahunnya, sebagai satu bentuk pertanggungjawaban STAI Madinatun Najah Rengat terhadap Yayasan. Hasil pelaporan tersebut kemudian menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut bagi STAI Madinatun Najah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan-pengembangan dalam bidang pembiayaan pendidikan.

Kesimpulan

Keuangan dalam pencapaian tujuan lembaga pendidikan merupakan suatu hal yang sangat krusial. Sebab pembiayaan merupakan faktor kunci tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Berkaitan erat dengan pelayanan pendidikan yang diberikan, kesejahteraan dosen, motivasi dan kinerja dosen, dan keharmonisan lembaga. STAI Madinatun Najah sebagai penyelenggara pendidikan tinggi swasta, dengan segala keterbatasannya mampu memberikan yang terbaik bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikannya. Beberapa langkah strategis yang diambil STAI Madinatun Najah dalam pengelolaan pembiayaan dapat disimpulkan menjadi beberapa hal: 1) memberikan banyak keringanan dan penyesuaian terhadap mahasiswa terkait biaya studi, 2) memberikan peluang bagi calon mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non-akademik untuk mendapatkan berbagai macam diskon, 3) menyediakan anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, 4) mendorong dan mengusahakan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa atau bantuan-bantuan lain yang diselenggarakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah, 5) memberikan motivasi dan penghargaan kepada dosen agar mengembangkan tridharma perguruan tinggi secara

optimal, 6) membantu dan mendorong dosen untuk melengkapi dokumen sebagai syarat administratif pangkat dan jabatan fungsional akademik demi kesejahteraan mereka.

Daftar Pustaka

- Agustinus, Hermino. (2014) *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asep Suryana, Suryadi. (2009). *Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fatah, Nanang. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hanafiah, M. Jusuf. Dkk. (1994) *Pengelolaan Mutu Total Pendidikan Tinggi*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri.
- Heryati, Yeti. & Muhsin Mumuh. (2014) *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Husni, Karna. (2015) *Manajemen Perubahan Sekolah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Mustari, Mohamad. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Republik Indonesia, PP. No. 48 Tahun 2008. Bagian Ketiga Biaya Operasi Satuan Pendidikan, Paragraf 1, Biaya personalia pasal 16
- Rohiat. (2010). *Manajemen Sekolah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shulhan, Nuwahid. (2013) *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardan, Dadang. dkk. (2012) *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Supriyadi, Dedi. (2010). *Satuan Biaya Pendidikan: Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Usman, Husaini. (2006). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.